

RENCANA KERJA

Dinas Sosial TAHUN 2025



dinsos@serangkab.go.id



(0254) 200304



Jl. Raya Petir - Serang, Curug,
Kec. Curug, Kota Serang,
Banten 42171

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Ungkapan rasa syukur kepada Allah S.W.T atas segala nikmat dan karunia, sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan acuan atas apa yang akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025, melalui usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, maka dari itu Kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak agar Rancangan Rencana Kerja Tahun selanjutnya dapat kami susun dengan lebih baik.

Serang, 3 Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinsos	5
2.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial	16
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan urusan Sosial.....	18
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Serang	36
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB IV PENUTUP	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Khususnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan dokumen yang di buat sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026, dimana Rencana Strategis Dinsos Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Serang periode 2021-2026, dimana Dinsos akan menjadi OPD yang mengambil bagian dalam mewujudkan misi ke 4 Pembangunan Kabupaten Serang, yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Sosial yaitu pada misi ke 4 khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial berada pada Tujuan Kedua pada misi yang ke empat yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social. Pagu anggaran yang disusun dan juga skala prioritas pada rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Rancangan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025.

Dalam rencana strategis Kementerian Sosial dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait dengan Kementerian Sosial, yaitu agenda ke dua Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; agenda ketiga Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing; agenda keempat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; serta agenda ketujuh Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, untuk mempercepat pencapaian target keempat agenda diatas telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, dari ke enam pengarusutamaan (mainstreaming) yang di tetapkan Kementerian Sosial yang sejalan dengan Rancangan Renja Dinsos Tahun 2025 adalah pengarusutamaan (mainstreaming) yang ketiga yaitu Pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimana focus pada Rancangan Renja Dinsos Tahun 2025 juga masih berfokus pada Pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.



1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permensos Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;



17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Logistik Korban Bencana di Wilayah Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Renja RKPD;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai Tujuan, Sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- 1.3.2.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan arah kebijakan tentang kesejahteraan social di wilayah Kabupaten Serang.
- 1.3.2.2 Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2025;



I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Serang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Serang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Serang

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Serang
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Serang

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Sosial Tahun 2023 juga harus dievaluasi.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

1. Kebijakan perencanaan program kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program Kegiatan
3. Hasil Pelaksanaan program kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2023 yang meliputi 3 (tiga) hal diatas dapat dilihat pada penjabaran tabel 2.1.a di bawah ini :



TABEL 2.1.a
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERIOIDE 2021-2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Dinsos Periode 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinsos Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos s/d Tahun 2024	
										Target Renja Dinsos Tahun 2023	Realisasi Renja Dinsos Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2024 (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100	%	67	100 %	97,14 %	97,14	100 %	100	100
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD	72	Kegiatan	22	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	12 Kegiatan	46	63,89
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	2	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4	67
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6	Dokumen	2	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4	67
2	06	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD.	6	Dokumen	2	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4	67
3	06	01	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA- SKPD	6	Dokumen	2	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4	67
4	06	01	2.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA- SKPD	6	Dokumen	2	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4	67



5	06	01	2.05	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	6	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	12	67
6	06	01	2.06	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24	Laporan	8	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	16	67
1	06	01	2.02		Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	88	Kegiatan	24	15 Kegiatan	14 Kegiatan	93,33	15 Kegiatan	53	60,23
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2856	Orang/Bulan	696	476 Orang/Bulan	442 Orang/Bulan	92,86	33 Orang/Bulan	1171	41,00
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3	75
1	06	01	2.06		Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	Kegiatan	36	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100	18 Kegiatan	90	100
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor	6	Paket	3	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	5	83,33
1	06	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (meja kerja, kursi, laptop dan printer)	6	Paket	1	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	6	100
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	6	Paket	1	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3	50
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6	Paket	2	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4	66,67
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & Peraturan Perundang Undangan	72	Dokumen	21	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1 Dokumen	34	47,22
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	24	Laporan	5	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	7	29,17
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	3	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5	20,83
1	06	01	2.07		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	96	Kegiatan	31	24 Kegiatan	23 Kegiatan	95,83	2 Kegiatan	56	58,33
1	06	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72	Laporan	20	12 Laporan	11 Laporan	91,67	1 Laporan	32	44,44



1	06	01	2.07	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24	Laporan	11	12 Laporan	12 Laporan	100	1 Laporan	24	100
1	06	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	20	Kegiatan	4	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	3 Kegiatan	8	40
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	1710	Unit	277	297 Unit	284 Unit	95,62	289 Unit	850	49,71
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	Unit				-	Unit	-	-
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80	%	74	80 %	73,22 %	91,53	80 %	80	100
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	5	Kegiatan	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	60
1	06	02	2.01	01	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	5	Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	60
1	06	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi PSKS	84	Kegiatan	22	12 Kegiatan	11 Kegiatan	91,67	11 Kegiatan	44	52,38
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	251	Orang	50	50 Orang	50 Orang	100	40 Orang	140	55,78
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	145	Orang	348	29 Orang	29 Orang	100	29 Orang	145	100
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	49.333	Keluarga	42.293	47299 Keluarga	47067 Keluarga	99,51	49.333 Keluarga	49.333	100
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Lembaga	3	4 Lembaga	3 Lembaga	75	4 Lembaga	10	41,67



1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Sertifikat	7	20 Sertifikat	20 Sertifikat	100	20 Sertifikat	47	55,29
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAN KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	%	100	100 %	100 %	100	100 %	100	100
1	06	03	2.01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan kepada keluarganya sampai ke Desa/Kelurahan Asal	6	Kegiatan	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	50
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Orang	2	1 Orang	1 Orang	100	15 Orang	18	100
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial	7,23	%	6,98	7,23 %	2,22 %	30,71	7,23 %	7,23	100
1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	100 %	100 %	100	100 %	100	100
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2630	Orang	685	94 Orang	103 Orang	109,57	83 Orang	871	33,12
2	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1800	Orang	539	Orang	2 Orang	#DIV/0!	10 Orang	551	30,61
2	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	413	Orang	71	2 Orang	12 Orang	600	7 Orang	90	21,79



2	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	2	Orang	12 Orang	#DIV/0!	10 Orang	24	96
2	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	480	Orang	71	Orang	17 Orang	#DIV/0!	12 Orang	100	20,83
2	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	660	Orang	142	Orang	8 Orang	#DIV/0!	50 Orang	200	30,30
2	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang		Orang	12 Orang	#DIV/0!	10 Orang	22	36,67
2	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang		Orang	1 Orang	#DIV/0!	5 Orang	6	30
2	06	04	2.01	11	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	4	Orang	7 Orang	#DIV/0!	10 Orang	21	84
2	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	1	Orang	6 Orang	#DIV/0!	6 Orang	13	65
1	06	04	2,02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Tertangani	527	Orang	133	70 Orang	70 Orang	100	70 Orang	273	51,80
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	1	3 Orang	3 Orang	100	3 Orang	7	35
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	4	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	24	40,00
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	32	Orang	- Orang	-	Orang	0	0



1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Orang	45	Orang	Orang	#DIV/0!	Orang	0	0
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Orang	32	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	82	78,10
1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	Jumlah Penerima Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	150	Orang		30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	60	40
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penerima Penelusuran Keluarga	15	Orang		Orang	Orang	#DIV/0!	Orang	0	0
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Pelayanan Reunifikasi keluarga	10	Orang		Orang	Orang	#DIV/0!	Orang	0	0
1	06	04	2,02	13	Pemberian layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	4	33,33
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08	%	0,06	0,08 %	0,07 %	87,50	0,08 %	0,08	100
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	90	Kegiatan	24	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100	18 Kegiatan	60	67
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5.544.870	Keluarga	121.810	119390 Keluarga	116326 Keluarga	97,43	134.187 Keluarga	372.323	6,71
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.248.872	Keluarga	79.517	72091 Keluarga	69259 Keluarga	96,07	84.854 Keluarga	233.630	4,45
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1050	Orang	185	245 Orang	245 Orang	100	300 Orang	730	69,52
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	100	100 %	100 %	100	100 %	100	100
1	06	06	2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	%	100	100 %	100 %	100	100 %	100	100



1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	55.500	Orang	21.113	9.250 Orang	4116 Orang	44,50	9.250 Orang	34.479	62,12
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	750	Orang	133	150 Orang	1514 Orang	1009,33	150 Orang	750	100
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	Orang		0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	Orang	0	0
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	650	Orang		0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	Orang	0	0
1	06	06	2,02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana dan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Pembinaan	12	Kegiatan	4	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	10	83
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Kampung	2	2 Kampung	2 Kampung	100	2 Kampung	6	50
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	620	Orang	60	60 Orang	60 Orang	100	60 Orang	180	29,03
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100	%	100	100 %	100 %	100	100 %	100	100
1	06	07	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara	47	Kegiatan	6	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	12	25,53
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12	Makam	3	2 Makam	2 Makam	100	2 Makam	7	58
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	Laporan	3	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5	42



Secara umum target dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.b berikut ini :

Tabel 2.1.b
Target dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.881.091.051	7.208.475.112	91,47
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.679.454	34.458.636	77,12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.766.854	26.031.136	93,75
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.250.000	1.800.000	80
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	794.000	792.000	99,75
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.318.600	618.600	46,91
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	2.991.900	74,80
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.750.000	2.225.000	32,96
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.209.250.000	5.740.348.969	92,45
8	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.208.100.000	5.739.623.969	92,45
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.150.000	725.000	63,04
3	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	765.977.017	754.748.812	98,53
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.743.200	7.431.400	95,97
12	Penyediaan bahan logistik kantor	140.913.100	140.850.100	99,96
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.329.717	56.271.900	91,75
14	Penyediaan Bahan- Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	1.872.000	52
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.646.000	12.550.000	99,24
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.745.000	535.773.412	99,26
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.859.880	555.321.395	85,72
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.258.000	287.204.950	94,71
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.601.880	268.116.445	77,80
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.324.700	123.597.300	57,94
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.324.700	123.597.300	57,94



2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.095.582.400	1.055.347.415	96,33
	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	15.099.000	14.879.300	98,54
20	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	15.099.000	14.879.300	98,54
6	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.080.483.400	1.040.468.115	96,30
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.979.900	9.960.800	99,81
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	392.988.400	361.084.200	91,88
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16.520.000	16.449.500	99,57
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	622.685.500	614.939.315	98,76
25	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38.309.600	38.034.300	99,28
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAN KEKERASAN	7.612.000	6.275.000	82,44
7	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	7.612.000	6.275.000	82,44
26	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.612.000	6.275.000	82,44
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	272.231.584	242.769.315	89,18
8	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	182.502.984	157.109.105	86,09
27	Penyediaan Permakanan	69.582.000	62.606.000	89,97
28	Penyediaan Sandang	7.239.600	1.950.000	26,94
29	Penyediaan Alat Bantu	19.433.100	16.225.000	83,49
30	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.000.000	1.275.000	63,75
31	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	45.751.284	42.085.105	91,99
32	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	19.497.000	17.968.000	92,16
33	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.300.000	4.900.000	92,45
34	Pemberian Layanan Kedaruratan	3.975.000	3.450.000	86,79
35	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.625.000	3.325.000	59,11
36	Pemberian Layanan Rujukan	4.100.000	3.325.000	81,10



9	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti social	89.728.600	85.660.210	95,47
37	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.275.000	4.150.000	97,08
38	Penyediaan Permakanan	520.000	0	0
39	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18.350.000	18.350.000	100
40	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	25.874.800	25.850.000	99,90
41	Pemberian Layanan Rujukan	40.708.800	37.310.210	91,65
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.017.030.112	980.272.945	96,39
10	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.017.030.112	980.272.945	96,39
42	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	155.539.112	145.355.420	93,45
43	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	64.592.700	50.880.000	78,77
44	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	796.898.300	784.037.525	98,39
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.183.367.800	1.108.562.200	93,68
11	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	844.500.000	769.938.500	91,17
45	Penyediaan Makanan	744.430.000	670.543.000	90,07
46	Penyediaan Sandang	100.070.000	99.395.500	99,33
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	338.867.800	338.623.700	99,93
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	23.798.900	23.594.300	99,14
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	315.068.900	315.029.400	99,99
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	64.156.300	60.360.500	94,08
13	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	64.156.300	60.360.500	94,08
41	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.156.300	38.360.500	95,53
42	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.000.000	22.000.000	91,67
Total Belanja		11.521.071.247	10.662.062.487	92,54



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Serang

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinsos Tahun 2021-2026 untuk urusan Sosial sesuai fungsi dan tugas Dinas Sosial Kabupaten Serang dapat dilihat pada table 2.2 sebagai berikut :



TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DINAS SOSIAL				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Perlindungan dan Jaminan sosialpada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Urusan Sosial

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

➤ Permasalahan

- a. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat;
- b. Memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi;
- c. Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan social
- d. Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial;
- f. Pembiayaan dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial

➤ Hambatan

- a. Masih melekatnya budaya malas untuk dapat mandiri dari setiap individu yang menjadi target pelayanan kesejahteraan social;
- b. Keterbatasan anggaran dalam pelayanan kesejahteraan social;
- c. Sarana dan prasana yang belum memadai dalam pelayanan kesejahteraan social;

2.3.2 Tantangan dan Peluang

➤ Tantangan

- a. Belum adanya aturan tentang pembentukan organisasi yang baru yang menyesuaikan dengan aturan tentang nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang baru.
- b. Belum terintegrasinya antar OPD dan lembaga lainnya serta dunia usaha, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Belum adanya payung hukum yang terkait dengan pembuatan data yang dapat mengintegrasikan indikator atau kepentingan dari masing-masing OPD ataupun lembaga yang lainnya.
- d. Mobilitas pergantian pimpinan dan pejabat di Dinas Sosial yang pada umumnya relatif cepat, sehingga pimpinan harus beradaptasi dan penyesuaian terlebih dahulu yang mengakibatkan kebijakan yang lambat.
- e. Belum ada payung hukum/kebijakan penempatan petugas pelayanan kesejahteraan sosial/ Pekerja Sosial.
- f. Belum adanya personil yang berstatus ASN yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pekerjaan sosial dan fungsional yang kompeten sesuai bidang pelayanan, sehingga masih membutuhkan adanya pelatihan pelatihan, advokasi atau pendampingan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
- g. Belum tersedianya data base yang akuntabel dan tervalidasi secara berkala.



➤ **Peluang**

- a. Support dan Komitmen Kepala Daerah untuk beberapa jenis program penanggulangan kemiskinan yang ada di beberapa Dinas/OPD akan menjadi entry point awal penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai dengan jenis layanan yang ada, tentunya berdasarkan sinkronisasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sasaran program yang ada di setiap Dinas/OPD.
- b. Komitmen dalam penyelenggaraan kesejahteraan social dari semua pihak sehingga terwujudnya pelayanan terpadu satu atap (one stop services) untuk penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial lainnya secara terencana, sistematis, terkoordinir dan berkelanjutan.
- c. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial khususnya dalam pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat akan menjadi entry point kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu jika di support dengan anggaran yang memadai dan proporsional.

2.3.3 Isu Strategis

Isu isu penting dalam penyelenggaraan urusan social yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang yang kemudian menjadi tantangan permasalahan yang harus segera di selesaikan adalah diantaranya:

- a. Masih banyak PMKS yang belum tertangani, hal ini dikarenakan anggaran yang masih belum memadai dan proporsional.
- b. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai khususnya Pekerja Sosial Profesional.
- c. Belum adanya rumah singgah, sebagai shelter atas penanganan PMKS yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Serang.
- d. Budaya masyarakat kita khususnya PMKS yang masih belum bisa merubah kebiasaan hidup bergantung kepada orang lain dan sulit untuk bisa mandiri.

Isu isu sebagaimana dijelaskan di atas tentunya sangat berpengaruh pada capaian terhadap target Visi dan Misi Kepala Daerah dalam Rencana Jangka Menengah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, maka diperlukan dukungan dari para stakeholder (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll).

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Target dan pagu indikatif yang ada pada rancangan RKPD menyesuaikan dari hasil analisa kebutuhan yang di hitung oleh masing masing bidang yang ada di Dinas Sosial, berdasarkan capaian target tahun sebelumnya dan tentunya mengacu pada target yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, maka dijabarkan pada table 2.4 di bawah ini:

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100%	8.583.040.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	100%	8.934.690.503	Pagu indikatif hasil analisa kebutuhan lebih besar dari pagu indikatif pada rancangan awal RKPD itu di karenakan factor kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perhitungan yang di buat oleh pelaksana Program
1	Perencanaan,Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Terselenggaraan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran	12 Kegiatan	69.894.952	Perencanaan,Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Terselenggaraan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran	12 Kegiatan	93.840.429	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.613.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.956.824	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.795.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4.183.987	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.343.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.686.539	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	3.344.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	3.686.760	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.343.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.686.319	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2022	3 Laporan	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2022	3 Laporan	17.640.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Terevaluasinya kinerja perangkat Daerah per triwulan	4 Laporan	7.454.652	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Terevaluasinya kinerja perangkat Daerah per triwulan	4 Laporan	20.000.000	
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Serang	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	15 Kegiatan	6.528.399.800	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Serang	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	15 Kegiatan	6.528.399.800	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinso	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	33 /14 Orang/Bulan	6.522.400.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	33 /14 Orang/Bulan	6.522.400.000	
9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinso	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	5.999.800	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinsos	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	5.999.800	
3	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Serang	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	909.794.808	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Serang	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	880.963.728	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Tersedianya komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	15.495.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Tersedianya komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	17.083.899	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinsos	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (meja kerja, kursi, leptop dan printer)	1 Paket	223.046.736	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinsos	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (meja kerja, kursi, leptop dan printer)	1 Paket	123.823.980	
12	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinsos	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	90.453.700	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinsos	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	99.725.204	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Paket	47.792.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Paket	52.690.680	



14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Tersedianya bahan bacaan	1 Dokumen	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Tersedianya bahan bacaan	1 Dokumen	7.938.000	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.562.720	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.806.572	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	552.139.245	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Serang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	709.747.740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Serang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1.038.850.570	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	349.659.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	385.499.157	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Terfasilitasinya Jasa	1 Laporan	360088640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Terfasilitasinya Jasa	1 Laporan	653.351.413	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Serang	Terpeliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	365.202.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Serang	Terpeliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	392.635.976	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297 Unit	237.532.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297 Unit	264.965.976	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinsos	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Unit	127.670.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinsos	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Unit	127.670.000	

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab.Serang	Persentase Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80%	1.190.641.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab.Serang	Persentase Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80%	1.276.325.000	indikatif hasil analisa kebutuhan lebih besar dari pagu indikatif pada rancangan awal RKPD itu di karenakan factor kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perhitungan yang di buat oleh pelaksana Program
6	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin UGB dan PUB	1 Kegiatan	22.620.000	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin UGB dan PUB	1 Kegiatan	26.060.000	
21	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	Kab.Serang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	1 Dokumen	22.620.000	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	Kab.Serang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	1 Dokumen	26.060.000	
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Terlakananya Pembinaan dan Fasilitas PSKS dan UKS	14 Kegiatan	1.168.021.800	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Terlakananya Pembinaan dan Fasilitas PSKS dan UKS	14 Kegiatan	1.250.265.000	-
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	10.004.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	29.604.800	



23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	392.988.400	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	392.988.400	
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	49333 Keluarga	16.520.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	49333 Keluarga	44.363.200	
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	704.479.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	739.279.000	
26	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab.Serang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	44.029.600	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab.Serang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	44.029.600	



3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab.Serang	Persentase Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	9.428.600	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab.Serang	Persentase Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	19.428.600	indikatif hasil analisa kebutuhan lebih besar dari pagu indikatif pada rancangan awal RKPD itu di karenakan factor kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perhitungan yang di buat oleh pelaksana Program
8	Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Kab.Serang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan kepada Keluarganya sampai ke Desa/Kelurahan Asal	1 Kegiatan	9.428.600	Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Kab.Serang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan kepada Keluarganya sampai ke Desa/Kelurahan Asal	1 Kegiatan	19.428.600	
27	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.Serang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.428.600	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.Serang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	19.428.600	



4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab.Serang	Cakupan Rehabilitasi Sosial	7,23%	250.571.400	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab.Serang	Cakupan Rehabilitasi Sosial	7,23%	1.433.155.536	indikatif hasil analisa kebutuhan lebih besar dari pagu indikatif pada rancangan awal RKPD itu di karenakan factor kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perhitungan yang di buat oleh pelaksana Program
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kab.Serang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	118 Orang	158.944.568	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kab.Serang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	118 Orang	826.528.704	
28	Penyediaan Permakanan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	38.901.000	Penyediaan Permakanan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	208.901.000	
29	Penyediaan Sandang	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	7.000.000	Penyediaan Sandang	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	97.000.000	



30	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	29.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	159.000.000	
31	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Kab.Serang	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang Dilaksanakan	5 orang	3.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Kab.Serang	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang Dilaksanakan	5 orang	40.500.000	
32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Serang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	26.770.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Serang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	66.770.000	
33	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Serang	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dilaksanakan	30 orang	31.673.568	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Serang	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dilaksanakan	30 orang	82.244.968	
34	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	3.500.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	29.500.000	
35	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	3.900.000	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	59.900.000	
36	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5.600.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	33.612.736	
37	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	9.100.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	49.100.000	



10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti social	Kab.Serang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Tertangani	93 Orang	91.626.832	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti social	Kab.Serang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Tertangani	93 Orang	606.626.832	
38	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	5.700.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	50.700.000	
39	Penyediaan Permakanan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	1.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	151.000.000	
40	Penyediaan Sandang	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyediaan Sandang	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		120.000.000	
41	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyediaan Alat Bantu	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		140.000.000	
42	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Serang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	18.350.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Serang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	38.350.000	
43	Pemberian layanan Rujukan	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	40.702.032	Pemberian layanan Rujukan	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	50.702.032	



44	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Kab.Serang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan diluar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Kab.Serang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan diluar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000	
45	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25.874.800	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45.874.800	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab.Serang	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08%	1.458.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab.Serang	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08%	1.360.465.472	indikatif hasil analisa kebutuhan lebih besar dari pagu indikatif pada rancangan awal RKPd itu di karenakan factor kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perhitungan yang di buat oleh pelaksana Program
11	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab.Serang	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS	18	1.458.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab.Serang	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS	18	1.360.465.472	



46	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/kota	Kab.Serang	Jumlah Up dating data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS			Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/kota	Kab.Serang	Jumlah Up dating data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS			
47	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab.Serang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	924145 Keluarga	441.274.836	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab.Serang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	924145 Keluarga	343.740.308	
48	Fasilitasi Bantuan Sosial	Kab.Serang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72901 Keluarga	93.450.000	Fasilitasi Bantuan Sosial	Kab.Serang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72901 Keluarga	93.450.000	
49	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	326 Orang	923.275.164	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab.Serang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	326 Orang	923.275.164	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab.Serang	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	1.000.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab.Serang	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	1.060.500.000	indikatif hasil analisa kebutuhan lebih besar dari pagu indikatif pada rancangan awal RKPD itu di karenakan factor kebutuhan yang sebenarnya berdasarkan perhitungan yang di buat oleh pelaksana Program



12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	9400 Orang	904.943.500	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	9400 Orang	915.443.500	
50	Penyediaan Makanan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9250 Orang	704.943.500	Penyediaan Makanan	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9250 Orang	704.943.500	
51	Penyediaan Sandang	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	200.000.000	Penyediaan Sandang	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	210.500.000	
52	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab.Serang	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Tersedia			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab.Serang	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Tersedia			
53	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab.Serang	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial yang Dilaksanakan			Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab.Serang	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial yang Dilaksanakan			
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Anggota Tagana dan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Pembinaan	4 Kegiatan	95.056.500	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Anggota Tagana dan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Pembinaan	4 Kegiatan	145.056.500	

54	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab.Serang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana KewenanganKabupaten /Kota	2 Kampung	33.150.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab.Serang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana KewenanganKabupaten /Kota	2 Kampung	53.150.000	
55	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	16.906.500	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	46.906.500	
56	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	45.000.000	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Kab.Serang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	45.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab.Serang	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	68.558.200	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab.Serang	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	68.558.200	
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara	3 Kegiatan	68.558.200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara	3 Kegiatan	68.558.200	
57	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	44.558.200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	44.558.200	
58	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	24.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Serang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	24.000.000	
					12.560.240.000					14.153.123.311	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dapat dilihat pada table 2.5 berikut

TABEL 2.5
FORMAT USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SERANG

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial			
1	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Baros	20 Kelompok	Sudah ada kelompok, tapi belum mendapatkan bantuan atau kegiatan apapun dari pemerintah
	Sub Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kec. Baros	14 Desa	Untuk meningkatkan pemahaman operator Siks NG
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial			
2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi PSKS			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Cikande	13 Desa	Bimtek Pekerja Sosial Masyarakat/PSM Se Kecamatan



Berdasarkan hasil musrembang Kecamatan sebagai mana tergambar dalam table diatas, bahwa ada dua puluh tiga (23) usulan yang masuk yang diusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Serang, meski banyak dari usulan diatas sebetulnya bukan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Serang seperti Pelatihan dapur sehat dan penanganan Stunting, yang itu menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan, kemudian usulan terkait bantuan honor pemandi jenazah, dimana itu kewenangannya ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Serang, kemudian ada usulan terkait nikah massal untuk calon pengantin, dimana itu kewenangannya ada pada Kementerian Agama, sedangkan usulan yang sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Serang yaitu terkait Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan dalam usulan diatas terkait bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada sebanyak 5 usulan yang berasal dari lima (5) Kecamatan yaitu 1. Desa Sukacai Kecamatan Baros. 2. Desa Pontang Kecamatan Pontang, 3. Desa Cireundeu Kecamatan Petir, 4. Desa Tambak Kecamatan Kibin, 5. Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal, maka dari dua puluh tiga (23) usulan hasil Musrembang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam table diatas, yang akan di akomodir oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah yang terkait Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Serang.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional terkait dengan penanganan PMKS di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
- b Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab
- c Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologis maupun fisiologis
- d Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar
- e Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga ketuhanan religius dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat.
- f Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomim sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya
- g Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi :

- a Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang

Dinas Sosial sebagai instansi yang focus dalam penanganan Kesejahteraan Sosial tentu memiliki Tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (*Lima*) Tahun kedepan adalah :

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang

Dalam rangka mencapai tujuan diatas maka yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam waktu 5 (*Lima*) Tahun kedepan adalah :

“Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social”

Untuk memenuhi capaian sasaran diatas maka di tentukan Indikator Kinerja Sasaran/Utama, yaitu:

“Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial “

Indikator Kinerja Sasaran/ Utama tersebut agar dapat diukur maka ditentukan target capaian, Indikator Kinerja Sasaran/ Utama Dinas Sosial berikut target sasaran selama Lima (5) Tahun Kedepan, Jika dirangkum dari tujuan, indicator tujuan, sasaran, indicator sasaran dan berikut target kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial lima (5) Tahun kedepan dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS SOSIAL TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ UTAMA	TARGET KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Prgram Pelayanan Sosial	3%	3%	3%	3%	3%	3%

3.3 Program dan Kegiatan

Beranjak dari Issu strategis yang diangkat dalam urusan social berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Serang periode 2021-2026 yang ke 4 yang kemudian ditentukan tujuan yang akan di raih lalu sasaran yang akan menjadi target kinerja Dinas Sosial, baru kemudian ditentukan strategi apa yang akan dilakukan Dinas Sosial barulah menentukan arah kebijakan, setelah arah



kebijakan di tentukan langkah terakhir adalah menentukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan apa yang akan Dinas lakukan pada Tahun 2025, diantaranya dalam rangka pencapaian SPM urusan Sosial yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar PantI Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar PantI Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar PantI Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar PantI Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Tahun 2025 Dinas Sosial akan Melaksanakan 7 Program, 14 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan termasuk Kesekretariatan, penjabaran Program Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 3.3 berikut ini:

TABEL 3.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		12	Penyediaan bahan logistik kantor
		13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		15	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
6.	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	21	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB
7.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		26	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
III.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAN KEKERASAN		
8.	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	27	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
IV.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
9.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	28	Penyediaan Permakanan
		29	Penyediaan Sandang
		30	Penyediaan Alat Bantu
		31	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga
		32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		33	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		34	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		35	Pemberian Pelayanan Kedaruratan
		36	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		37	Pemberian Layanan Rujukan



10	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	38	Pemberian Layanan Kedaruratan
		39	Penyediaan Permakanan
		40	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		41	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		42	Pemberian layanan Rujukan
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
11	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	43	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
		44	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		45	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
VI.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
12	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	46	Penyediaan Makanan
		47	Penyediaan Sandang
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	48	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
		49	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
VII.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		51	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025 di atas disusun dalam bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai program, kegiatan, Sub Kegiatan yang direncanakan, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Serang pada Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada bab sebelumnya telah dibahas, bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang pada Tahun 2025 terdiri dari 7 Program, 14 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan rencana pendanaan sebesar Rp. 13.553.123.311,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah). Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang pada Tahun 2025 dapat di lihat pada table berikut ini:



TABELI 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SERANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	6				BIDANG URUSAN : SOSIAL								
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos	Kab. Serang	100%	8.934.690.503	APBD Kab.Serag		100%	8.779.349.105
1	6	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Kab. Serang	12 Kegiatan	83.840.429	APBD Kab.Serag		12 Kegiatan	99.381.000
1	6	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kab. Serang	1 Dokumen	40.956.824	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	70.371.000
1	6	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Serang	1 Dokumen	4.183.987	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	5.000.000
2	6	1	02.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	1 Dokumen	3.686.539	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	4.000.000



3	6	1	02.03	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	Kab. Serang	1 Dokumen	3.686.760	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	4.000.000
4	6	1	02.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	Kab. Serang	1 Dokumen	3.686.319	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	4.000.000
5	6	1	02.05	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2022	Kab. Serang	3 Laporan	17.640.000	APBD Kab.Serag		3 Laporan	3.000.000
6	6	1	02.06	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kinerja perangkat Daerah per triwulan	Kab. Serang	4 Laporan	10.000.000	APBD Kab.Serag		4 Laporan	9.010.000
1	6	1	02.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Serang	15 Kegiatan	6.528.399.800	APBD Kab.Serag		15 Kegiatan	6.269.152.062
1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Serang	33 /14 Orang/Bulan	6.522.400.000	APBD Kab.Serag		33 /14 Orang/Bulan	6.263.152.062
1	6	1	02.02	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	Kab. Serang	1 Laporan	5.999.800	APBD Kab.Serag		1 Laporan	6.000.000
1	6	1	02.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Serang	7 Kegiatan	880.963.728	APBD Kab.Serag		7 Kegiatan	945.816.043
1	6	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kab. Serang	1 Paket	17.083.899	APBD Kab.Serag		1 Paket	18.500.000
1	6	1	02.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (meja kerja, kursi, leptop dan printer)	Kab. Serang	1 Paket	123.823.980	APBD Kab.Serag		1 Paket	345.116.043
1	6	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Serang	1 Paket	99.725.204	APBD Kab.Serag		1 Paket	85.000.000
1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Serang	1 Paket	52.690.680	APBD Kab.Serag		1 Paket	70.000.000

1	6	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kab. Serang	1 Dokumen	7.938.000	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	7.200.000
1	6	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 Laporan	27.562.720	APBD Kab.Serag		1 Laporan	45.000.000
1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 Laporan	552.139.245	APBD Kab.Serag		1 Laporan	375.000.000
1	6	1	02.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Serang	2 Kegiatan	1.038.850.570	APBD Kab.Serag		2 Kegiatan	815.000.000
1	6	1	02.07	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	1 Laporan	385.499.157	APBD Kab.Serag		1 Laporan	495.000.000
1	6	1	02.07	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terfasilitasinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	1 Laporan	653.351.413	APBD Kab.Serag		1 Laporan	320.000.000
1	6	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	Kab. Serang	2 Kegiatan	402.635.976	APBD Kab.Serag		2 Kegiatan	650.000.000
1	6	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Serang	297 Unit	261.879.801	APBD Kab.Serag		297 Unit	450.000.000
1	6	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Serang	1 Unit	140.756.175	APBD Kab.Serag		1 Unit	200.000.000



1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Kab. Serang	80%	1.276.325.000	APBD Kab.Serag		80%	1.626.820.160
1	6	2	02.02		Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin UGB dan PUB	Kab. Serang	1 Kegiatan	26.060.000	APBD Kab.Serag		1 Kegiatan	77.125.260
1	6	2	02.01	1	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kab. Serang	1 Dokumen	26.060.000	APBD Kab.Serag		1 Dokumen	77.125.260
1	6	2	02.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlakananya Pembinaan dan Fasilitas PSKS dan UKS	Kab. Serang	14 Kegiatan	1.250.265.000	APBD Kab.Serag		14 Kegiatan	1.549.694.900
1	6	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	40 Orang	29.604.800	APBD Kab.Serag		40 Orang	180.000.000
1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	29 Orang	392.988.400	APBD Kab.Serag		29 Orang	499.694.900
1	6	2	02.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	49333 Keluarga	44.363.200	APBD Kab.Serag		49333 Keluarga	300.000.000

1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	4 Lembaga	739.279.000	APBD Kab.Serag		4 Lembaga	450.000.000
1	6	2	02.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	20 Sertifikat	44.029.600	APBD Kab.Serag		20 Sertifikat	120.000.000
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAN KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kab. Serang	100%	9.428.600	APBD Kab.Serag		100%	10.000.000
1	6	3	02.01		Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan.	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan kepada Keluarganya sampai ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Serang	1 Kegiatan	9.428.600	APBD Kab.Serag		1 Kegiatan	10.000.000
1	6	3	02.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	15 Orang	9.428.600	APBD Kab.Serag		15 Orang	10.000.000

1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial	Kab. Serang	7,23%	843.155.536	APBD Kab.Serag		7,23%	1.191.896.450
1	6	4	02.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Serang	118 Orang	556.528.704	APBD Kab.Serag		118 Orang	1.115.025.000
1	6	4	02.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	20 Orang	108.901.000	APBD Kab.Serag		20 Orang	359.345.000
2	6	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	10 Orang	97.000.000			10 Orang	168.000.000
2	6	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	5 Orang	59.000.000	APBD Kab.Serag		5 Orang	360.280.000
2	6	4	02.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang Dilaksanakan	Kab. Serang	5 Orang	30.500.000	APBD Kab.Serag		5 Orang	7.200.000
2	6	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial yang Dilaksanakan	Kab. Serang	10 Orang	66.770.000	APBD Kab.Serag		10 Orang	96.000.000

2	6	4	02.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dilaksanakan	Kab. Serang	30 Orang	82.244.968	APBD Kab.Serag		30 Orang	90.000.000
2	6	4	02.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	20 Orang	29.500.000	APBD Kab.Serag		20 Orang	12.000.000
2	6	4	02.01	10	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	3 Orang	29.900.000			3 Orang	10.000.000
2	6	4	02.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	5 Orang	23.612.736	APBD Kab.Serag		5 Orang	5.000.000
2	6	4	02.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	10 Orang	29.100.000	APBD Kab.Serag		10 Orang	7.200.000

1	6	4	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Tertangani	Kab. Serang	93 Orang	286.626.832	APBD Kab.Serag		93 Orang	76.871.450
1	6	4	2,02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	1 Orang	50.700.000	APBD Kab.Serag		1 Orang	4.957.200
1	6	4	2,02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	30 Orang	101.000.000	APBD Kab.Serag		30 Orang	4.860.000
1	6	4	2,02	4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	30 Orang	38.350.000	APBD Kab.Serag		30 Orang	12.241.250
1	6	4	2,02	5	Pemberian layanan Rujukan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	2 Orang	50.702.032	APBD Kab.Serag		2 Orang	52.963.000
1	6	4	2,02	7	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	30 Orang	45.874.800	APBD Kab.Serag		30 Orang	1.850.000



1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	Kab. Serang	0,08%	1.360.465.472	APBD Kab.Serag		0,08%	1.379.197.000
1	6	5	02.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS	Kab. Serang	18 Kegiatan	1.360.465.472	APBD Kab.Serag		18 Kegiatan	1.379.197.000
1	6	5	02.02	2	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Serang	924.145 Keluarga	343.740.308	APBD Kab.Serag		924.145 Keluarga	603.747.000
1	6	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	72.901 Keluarga	93.450.000	APBD Kab.Serag		72.901 Keluarga	129.200.000
1	6	5	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	326 Orang	923.275.164	APBD Kab.Serag		326 Orang	646.250.000
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kab. Serang	100%	1.060.500.000	APBD Kab.Serag		100%	930.000.000
1	6	6	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kab. Serang	9.400 Orang	915.443.500	APBD Kab.Serag		9.400 Orang	600.000.000

1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	9.250 Orang	704.943.500	APBD Kab.Serag		9.250 Orang	500.000.000
1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	150 Orang	210.500.000	APBD Kab.Serag		150 Orang	100.000.000
1	6	6	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana dan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Pembinaan	Kab. Serang	2 Kegiatan	145.056.500	APBD Kab.Serag		2 Kegiatan	330.000.000
1	6	6	2,02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	2 Kampung	53.150.000	APBD Kab.Serag		2 Kampung	160.000.000
1	6	6	2,02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	60 Orang	91.906.500	APBD Kab.Serag		60 Orang	170.000.000



1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	Kab. Serang	100%	68.558.200	APBD Kab.Serag		100%	170.600.000
1	6	7	02.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara	Kab. Serang	3 Kegiatan	68.558.200	APBD Kab.Serag		3 Kegiatan	170.600.000
1	6	7	02.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	2 Makam	44.558.200	APBD Kab.Serag		2 Makam	100.000.000
1	6	7	02.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Serang	1 Laporan	24.000.000	APBD Kab.Serag		1 Laporan	70.600.000
Jumlah									13.553.123.311				14.087.862.715



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan gambaran tentang apa saja yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Serang pada Tahun 2025, tentunya masih dalam menunjang Visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Serang, serta selaras dengan target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025, dengan kaidah pelaksanaan menggunakan pola diskusi internal Dinas Sosial antara bidang bidang yang ada dengan mempertimbangkan segala aspek penunjang dan semua hal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Dinas Sosial, dan tentunya segala kekurangan yang mungkin ada dalam Rencana Kerja Dinas Sosial ini akan di perbaiki dan disempurnakan pada saat penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang pada perencanaan tahun berikutnya.

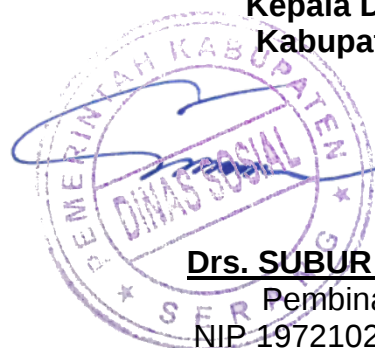
Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa yang masih menjadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraan social adalah bagaimana penanganan PMKS menjadi lebih baik maka catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial.
- b. Mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga penanganan PMKS dapat mencapai hasil yang maksimal terutama dengan memberikan bantuan untuk modal usaha bagi keluarga fakir miskin yang merupakan PMKS terbanyak di Kabupaten Serang.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk memberdayakan PSKS agar kompetensinya meningkat sehingga dapat membantu dalam menangani PMKS secara maksimal.

Maka akhirnya semoga melalui Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025, dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial agar lebih terarah, efektif dan efisien dan dapat memenuhi target target yang sudah di tetapkan, baik dalam Renstra Dinsos Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026.

Serang, 3 Juli 2024

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Serang**


Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
Pembina Tk.1, IV/b
NIP 19721023 199203 1 002

